

**IMPLEMENTASI  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2000  
TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM JABATAN STRUKTURAL  
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**ABSTRAK**

Perubahan paradigma di era reformasi, ada kecenderungan kebijakan pengembangan karier pegawai dikaitkan dengan kebijakan politik. Sehingga seseorang menduduki suatu jabatan hanya karena akses politik dan kurang memiliki kompetensi dalam jabatan, prinsip profesionalisme, prestasi kerja dan regenerasi. Kebijakan pemerintah tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 antara lain menyatakan bahwa seseorang yang diangkat dalam jabatan struktural harus memiliki prestasi kerja yang baik dan memenuhi persyaratan kompetensi jabatan yang diperlukan. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan menganalisis faktor kompetensi dan kinerja serta faktor penghambat proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil penelitian memperlihatkan secara umum pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktral telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari aspek kompetensi disimpulkan bahwa masih terdapat pejabat yang kurang memenuhi persyaratan jabatan seperti ketrampilan, pengetahuan, peran sosial, citra diri, sikap atau perilaku, dan motivasi. Dari aspek kinerja yaitu kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas terjadi peningkatan, namun belum mampu memenuhi harapan masyarakat.

Kata Kunci : PNS, Jabatan Struktural, Pengangkatan, Pemilihan.

**IMPLEMENTATION  
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 100 YEAR 2000  
APPOINTMENT OF CIVIL SERVANTS  
POSITION IN STRUCTURAL  
IN THE DISTRICT LIMA PULUH KOTA**

**ABSTRACT**

*The change of paradigm in the reformation era, there is a tendency that the policy of employee's career development is connected to the political policy. Thus, a person holds a position just because of a political access and he/she has less competence in the mentioned position, principles of professionalism, working achievement, and regeneration. Government policy on the appointment of civil servants in a structural position as set out in government regulation number 100 in 2000, among other things, that the person raised in a structural position must have a good work performance by metting the requirements competencies required position. The Thesis aims to determine the appointment of civil servants in the structural position and analyze the factors inhibiting the appointment process civil servants in a structural position in Lima Puluh Kota Regency. The result of the research showed that generally civil servant appointment in a structural position had been performed suitably as it is ruled. From competency aspect, it can be conclude that there still functionaries who less meet the competency prerequisite in his/her position such as skill, knowledge, social roles, self-image, anttitude or behavior, and motivation. From performance aspects of quality of service, responsiveness, responsibility and accountability, improvement are occurred, but do not meet the public expectation yet.*

*Keywords:* Civil Servant, Structural Position, Appointment, Selection.

